

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KONSEP WALI MUJBIR

SKRIPSI



Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS X S-2011 038 AS	No. REG : S-2011/AS/038
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

PUJILESTARI
NIM: C51207043

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah

SURABAYA
2011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Lestari

NIM : C51207043

Semester : VIII

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

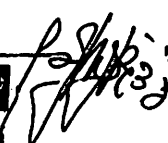
Alamat : JL. Wali Songo No. 98 Rt.2/Rw.2 Ngabar Siman Ponorogo 63471

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul *"Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wali Mujbir"* adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Juni 2011

METERAI
TEMPEL
REPUBLIK INDONESIA
3CA41AAE4157B5101
6000
Puji Lestari



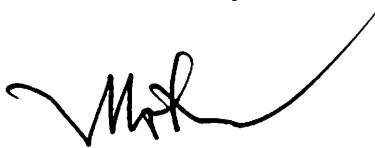
NIM: C51207043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Puji Lestari ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Masruhan', with a long, sweeping flourish extending to the right.

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Puji Lestari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Dr. Masruhan, M.Ag

NIP: 195904041988031003

Sekretaris,



Moh. Hatta, M.HI

NIP: 197110262007011012

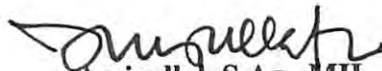
Penguji I,



Dr. H. Abdullah, M.Ag

NIP: 196309041992031002

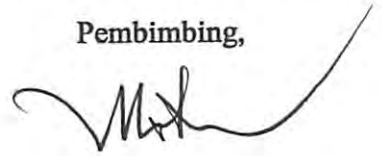
Penguji II,



Amirullah, S.Ag., MH

NIP.197201012003121002

Pembimbing,



Dr. Masruhan, M.Ag

NIP: 195904041988031003

Surabaya, 20 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian Pustaka untuk menjawab pertanyaan mayor: bagaimana analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wali *Mujbir*. Selanjutnya pertanyaan minor yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah: 1) bagaimana konsep wali mujbir menurut Husein Muhammad? 2) bagaimana metode *istinbāt* hukum Husein Muhammad tentang wali *mujbir*?

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data dengan teknik dokumenter dan didukung dengan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami konsep wali mujbir menurut Husein Muhammad dan metode *istinbāt* yang digunakan dalam konsep tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat memperluas dan memperkaya ilmu fiqh tentang konsep perwalian. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan wali mujbir.

Hasil penelitian menyimpulkan, berbeda dengan mayoritas Ulama fiqh, Husein Muhammad berpendapat bahwa Wali *mujbir* tidak berhak memaksa dan menentukan pasangan bagi anak perawannya yang sudah dewasa. Unsur kerelaan dalam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat urgen sehingga tidak boleh dinafikan begitu saja. Lebih lanjut lagi, indikasi kerelaan Perawan menurut Husein tidak cukup dengan diam, diperlukan lagi pengetahuan akan psikologis anak perawan tersebut. Apalagi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini yang sudah jauh berbeda dengan beberapa abad silam. Bila masih terjadi praktek pemaksaan sedangkan sang perawan benar-benar menolak maka hal ini sama dengan ikrah. Konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum.

Pendapat Husein di atas tidak terlepas dari Metode *istinbāt* hukum yang digunakan yakni pendekatan maknawi (Subtansif) dan juga kontekstual (Kondisional). Terlihat dari pendapatnya yang menyatakan bahwa kondisi perawan pada masa lalu dan saat ini berbeda, sehingga menuntut hukum yang berbeda pula. Serta pemaknaannya terhadap hadits-hadits tentang izin seorang perawan dan juga janda. Husein menitik beratkan semuanya itu pada *maṣlahah* yang dikandung hukum tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran baik bagi wali maupun perawan yang telah dewasa untuk bermusyawarah dalam hal pasangan hidup. Musyawarah sebagai solusi yang akan menjembatani dua kepentingan yang semestinya bisa berjalan beriringan, mengingat bahwa seseorang hidup tidak pernah lepas dari sosialnya. Baik itu masyarakat dalam lingkup kecil yakni keluarga maupun skup yang lebih besar.

Bab kedua tentang landasan teori. Bab ini membahas tentang pengertian wali, dasar hukum wali, macam-macam wali, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan wali.

Bab ketiga, pembahasan. Bab ini membahas tentang biografi intelektual Husein Muhammad mulai dari riwayat pendidikan hingga karya-karya yang dihasilkannya, metode *istinbāt* yang digunakan serta konsep wali menurut Husein Muhammad.

Bab keempat tentang analisis. Bab ini berfungsi untuk menganalisis tentang pemikiran Husein Muhammad tentang wali *mujbir*, menganalisis metode yang digunakan Husein Muhammad.

Bab kelima tentang penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

WALI DALAM PERKAWINAN ISLAM

A. Pengertian Wali

Wali Menurut bahasa, berarti pelindung, pemelihara, pemimpin dan kekasih.¹ wali adalah orang yang menurut hukum dapat disertai kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan.² Adapun menurut istilah wali diartikan sebagai orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Juga bisa diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Dapat pula diartikan sebagai kepala pemerintahan.³

Wilāyah dalam Ensiklopedi Hukum Islam diartikan dengan dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah, dan Pemerintahan. Dalam Fikih, kata *wilāyah* digunakan sebagai wewenang seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak

¹ M. Ishom El Saha, Saiful Hadi, *Sketsa Al-Qur'an*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2005), 798.

² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 1146.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 165.

Tentang hak wali *mujbīr* terhadap anak perawan maupun janda maka menurut Abu Hanifah antara perawan dan janda manakala telah dewasa dan berakal serta merdeka, bukan budak berlaku baginya *wilāyah istihbāb*. Yakni wilayah yang memberikan ruang bagi anak perempuan dewasa untuk melakukan urusannya sendiri tanpa bergantung kepada walinya.²⁰ Hal ini disandarkan pada hadits Rasulullah SAW:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَ الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَ إِذْنُهَا
صُمَاتُهَا

Artinya: “Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai persetujuannya tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya.”²¹

Menurut Ulama Hanafi, hadits di atas menjadikan hak bagi wanita mengenai dirinya, dan menafikan urusan orang lain dalam hal yang berhubungan dengan nikahnya, serta melingkupi apa yang berhubungan dengan memilih calon suami, juga yang berhubungan dengan akad. Adapun mengenai perawan, bila melihat dari segi sifat dan kebiasaannya yang malu-malu untuk menegaskan kerelaannya, lebih-lebih untuk bertindak secara langsung dalam akad, syara’ mencukupkan dengan sesuatu yang

²⁰ M. Husain az-Zahaby, *al-Syarī’ah*, 117.

²¹ Zaki al-Din ‘Abd al-‘Azim, *Mukhtasar Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Al-Maktab al-Islam, 2002),

BAB III

PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG WALI MUJBIR

A. Biografi dan Karya-karya Husein Muhammad

1. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir di Cirebon, tepatnya di Arjawinangun pada tanggal 9 Mei 1953 M. Husein lahir dan besar dalam keluarga besar Pondok Pesantren Dar at-Tauhid. Ibunya bernama Ummu Salma Syathori, putri dari KH Syathori yakni pendiri pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun. Sedangkan Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar belakang pendidikan pesantren pula.¹

Pondok pesantren Dar at-Tauhid, tempat lahir dan besarnya Husein, pada saat itu merupakan pesantren yang modern dibandingkan pesantren pada umumnya di Cirebon. Alasannya KH. Syathori pada masanya sudah berpikir dan bersikap sangat moderat dengan memulai pendidikan pesantren dengan menggunakan papan tulis, kelas-kelas dan bangku-bangku. Padahal di pesantren lain hal seperti itu dianggap masih

¹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), 110.

13. **Pengurus PP RMI pada tahun 1989-1999**
14. **Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati pada tahun 1999-sekarang**
15. **Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA pada tahun 2000-sekarang**
16. **Ketua umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah, Arjawinangun pada tahun 1998-sekarang**
17. **Kepala Madrasah Aliyah Nusantara yang berlokasi di Arjawinangun pada tahun 1989-sekarang**
18. **Kepala SMU Ma'arif Arjawinangun pada tahun 2001**
19. **Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Arjawinangun pada tahun 1996- sekarang**
20. **Ketua Kopontren Dar at-Tauhid pada tahun 1994 hingga sekarang**
21. **Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Orsat Kabupaten Cirebon pada tahun 1994 sampai 2000**
22. **Ketua I Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon dari tahun 1992-sekarang**
23. **Pemimpin Umum/Penanggung jawab dwi bulanan "Swara Rahima"**
24. **Dewan Redaksi jurnal dwi bulanan "Puan Amal Hayati"**
25. **Konsultan Yayasan Balqis untuk hak-hak perempuan pada tahun 2002**
26. **Pendiri Puan Amal Hayati, Cirebon**

BAB IV

ANALISIS KONSEP WALI MUJBIR DALAM PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD

A. Analisis terhadap Konsep Wali Mujbir Menurut Husein Muhammad

Wali diartikan dengan pelindung maupun penguasa. Pelindung (wali) dari segi subyeknya dibagi menjadi dua, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri karena ia telah cakap hukum (*wilāyah ashliyah*) dan juga seseorang yang memiliki wewenang terhadap orang lain karena hubungannya dengan orang lain tersebut yang berada di bawah pengampuannya (*wilāyah niyābah*).

Wilāyah Niyābah sendiri dibagi dalam dua wilayah yakni yang bersifat umum dan khusus. Bersifat umum contohnya kewenangan pemerintah atas rakyatnya, sedangkan yang bersifat khusus adalah kewenangan dalam diri pribadi orang lain begitu pula masalah harta bendanya. Wilayah khusus dalam diri pribadi orang lain termasuk di dalamnya hak untuk menikahkan orang yang berada di bawah pengampuannya.

Kriteria seseorang dikatakan sebagai orang yang belum cakap hukum meliputi beberapa poin di bawah ini:

1. Masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan

2. Budak
3. Orang gila
4. Orang bodoh

Namun dalam penentuan kriteria ini Imam Syafi'i menambahkan status perawan sebagai salah satu unsur berlakunya pengampuan. Bila dikaitkan dengan hak pemilihan jodoh maupun hak menikahkan maka para Ulama mazhab fiqh termasuk di dalamnya Imam Syafi'i melegalkan adanya hak *ijbār* (penentuan jodoh, menikahkan) terhadap anak perawan tersebut. Kewenangan ini khusus bagi Ayah maupun Kakek. Begitu pula pendapat *Ja'fariyah*, *Mālikiyah* dan juga *Hanābilah* meskipun golongan-golongan ini berbeda-beda dalam menentukan siapakah yang berhak memaksa perawan untuk menikah.

Para ulama' yang memperbolehkan wali mujbir menikahkan anak perawannya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu dengan syarat -syarat sebagai berikut:

1. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
2. Laki- laki pilihan harus sekufu dengan perempuan itu.
3. Mahar tidak kurang dari mahar *mitsil*.

kebaikan anak tersebut. Jika anak tersebut lebih memilih pilihannya sendiri dan menolak usulan sang wali itu bukanlah suatu pelanggaran.

Wewenang wali terbatas kepada memberi usul karena yang menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah wali melainkan anak perawan tersebut. Sehingga, kerelaannya harus lebih diutamakan dari pada wali namun bukan berarti pertimbangan wali tidak diperlukan.

Jika kita bertumpu pada pandangan mayoritas Ulama mazhab maka wali menempati ruang yang lebih besar dari perawan itu sendiri. Tetapi akan menjadi *absurd* ketika diarahkan pada tujuan pernikahan sebagai media membangun hubungan yang *sākinah, mawaddah, wa rahmah* sedangkan para pelakunya atau salah satu pelakunya sama sekali tidak memiliki keinginan. Padahal, akad tersebut adalah akad bagi pernikahan yang merupakan *misāqan galīzan*.

Meskipun dalam pelaksanaan hak *ijbār* ini para Ulama menentukan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah *kafāah*. Bisa saja ukuran *kafāah* antara anak perawan dan sang wali terjadi perbedaan. Kriteria *kafāah* yang telah diungkapkan oleh Rasulullah terletak pada ukuran agama. Ukuran inilah yang dapat menjamin kebahagiaan rumah tangga. Sikap keberagamaan yang bagus akan melahirkan sebuah tanggung jawab dan juga kepedulian atas segala tindakan baik yang menyangkut dirinya maupun

sebagai bentuk ketidaksetujuannya. Kerelaan menjadi hal yang sangat penting karena berfungsi sebagai asas dalam pernikahan.

“Diam” tidak dapat serta merta menjadi ukuran persetujuan anak gadis. Perlu memahami bagaimana kondisi psikologis dan juga kepribadian anak tersebut dan bagaimana caranya mengutarakan ekspresi kekusarannya, kesenangan, persetujuannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja seorang perawan menjadikan diamnya sebagai aksi protes terhadap pilihan walinya.

Husein juga memberikan konsep berlakunya wali *mujbir* dengan batasan dewasa atau tidaknya seseorang. Bila anak perawan tersebut telah dewasa maka ia memiliki hak layaknya seorang janda yakni memilih calonnya berdasarkan nuraninya dengan pertimbangan baik dan buruknya. Manakala calon yang dipilihnya tidak sesuai dengan kehendak keluarga dan ia masih tetap bersikeras untuk memutuskan menikah dengannya itu bertanda bahwa segala konsekuensi setelah pernikahan itu merupakan hal yang harus dihadapinya.

Pemikiran semacam ini lebih rasional karena kemampuan seseorang untuk menentukan langkah bagi masa depannya tentu memerlukan kedewasaan berpikir dan juga kesanggupan serta kemampuan untuk mandiri. Sedangkan batasan perawan atau janda sebagai sebab ada atau tidaknya hak *ijbār* dirasa sudah tidak relevan bila dikaitkan dengan konteks sosial seperti sekarang ini. Mungkin pada masa itu (Imam Mazhab)

penentuan status inilah yang *maṣlahah*. Mengingat kondisi sosial pada saat itu dan juga tempat yang memposisikan wanita sebagai makhluk yang kurang cakap bertindak hukum dan tidak memiliki kedudukan yang berarti di dalam masyarakat. Sehingga mengharuskan wali untuk menentukan bagaimana jodoh yang kelak akan mendampingi hidupnya.

Penulis menempatkan unsur dewasa sebagai penggugur hak *ijbār* dalam menentukan pasangan sebagaimana pendapat Husein. Adapun seorang perawan tidak boleh diberi izin untuk menikah dengan pilihannya manakala beda agama dan juga beberapa ketentuan tentang keharaman lainnya.

B. Analisis terhadap Metode *Istinbāt* Hukum Husein Muhammad

Dalam proses penggalian hukum, Husein terlihat cenderung menggunakan pendekatan kontekstual. Ini tercermin dari pendapat Husein bahwa Al-Qur'an turun bukan tanpa sebab (*Asbab an-Nuzūl*). Sebab turunnya ini menandakan bahwa Al-Qur'an merupakan solusi atas permasalahan yang terjadi bumi. Selain itu, pembagian surat menjadi dua bagian yakni *makkiyah* dan *Madaniyyah* adalah penggambaran sejarah Al-Qur'an yang senantiasa melakukan dialog secara dinamis dan akomodatif, bernegosiasi dan melakukan interaksi dengan akal dan psikososial.

diamnya tersebut justru sebagai bentuk ketidaksetujuan akan apa yang dilakukan oleh walinya.

Begitu juga dalam menempatkan dewasa sebagai penghapus hak *ijbār*. Janda dan perawan saat itu menjadi penentu berlaku tidaknya hak *ijbār* karena kondisi sosial saat itu memang menghendaki demikian, janda lebih mengetahui akan urusannya sedang gadis perawan tidak atau kurang cakap dan malu-malu akan urusannya yang berkaitan dengan pernikahan. Dan ini menandakan bahwa sesungguhnya kedewasaanlah yang menjadi ukurannya.

Kedewasaan menjadi penentu berlaku tidaknya hak *ijbār* dirasa relevan dengan kondisi sosial seperti sekarang ini. Dimana, perempuan tidak lagi memiliki kedudukan serendah masa itu. Perempuan telah diberi ruang dan juga mendapatkan harga dirinya sebagai manusia yang bermartabat. Sosial menempatkan ukuran kecakapan dan kecerdasan dalam memperlakukan laki-laki maupun perempuan. Sehingga perempuan memiliki daya saing sesuai dengan kemampuannya, bahkan tidak jarang yang melebihi laki-laki.

Meskipun demikian, Husein menekankan bahwa tiap hukum itu harus mengarah kepada aspek *maṣlahahnya*. Itulah yang diyakini Husein bahwa hukum itu memiliki pembagian ruang dan juga waktu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berbeda dengan mayoritas Ulama mazhab, Husein memaknai wali *mujbir* sebagai seseorang yang melakukan tindakan atas dasar tanggung jawab dan memiliki hak mengarahkan bukan memaksa menikah seseorang di bawah pengampuannya (perawan dewasa). Bila terjadi *ikrah* maka akad tersebut batal demi hukum (*Fash*). Adapun indikasi kerelaan perawan adalah “Diam” dengan tidak ada indikasi penolakan dan tertekan jiwanya. Ini dilihat dari psikologi perawan tersebut. Pemberlakuan hak *ijbār* tergantung pada kedewasaan yang dimiliki oleh anak perawan tersebut.
2. *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Husein adalah pendekatan secara maknawi (Subtansif) dan kontekstual (Kondisional).

B. Saran

1. Kepada para Wali:

Janganlah menikahkan anak perawan dengan sekehendak hati tanpa memperhatikan keinginan dan persetujuannya. Yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah akad adalah sang anak bukan wali, jadi musyawarah adalah jalan terbaik.

